

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PENGAWASAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DAN PEMBANGUNAN SAUNG

1. Latar Belakang

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan jalan sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya.

Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan, terutama jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani serta jalan di bidang pertanian diantaranya adalah kurang memadainya sistem jaringan jalan primer dan atau kolektor dalam melayani Transportasi hasil pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan. Hal ini telah menyebabkan banyaknya kehilangan hasil produksi pertanian di akibatkan ketidakadaan jalan produksi pertanian yang optimal dan memadai. Salah satu keberhasilan pembangunan Pertanian Daerah adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik di wilayah pertanian tersebut. Selain berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang perkembangan fisik APBK daerah yang bersangkutan.

Kota Subulussalam dengan visi Kota sebagai Daerah Kota yang Memiliki daerah agroindustri akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Untuk mendukung visi dan misi tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Subulussalam selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Pertani dan pelaku Usaha Pertanian yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi. Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan jalan maka Pemerintah Daerah Kota Subulussalam melalui Dinas Pertanian perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam memandang perlu adanya perencanaan yang sistematis dan tepat guna pada kegiatan tersebut di atas, dengan harapan agar APBK dapat hasil perencanaan matang yang memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah teknis dan dapat diaplikasikan di lapangan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan transportasi yang berkualitas untuk mendukung geliat dan mobilitasi perekonomian masyarakat di bidang pertanian di Kota Subulussalam..

2. Maksud dan Tujuan

Jasa pelayanan ini dimaksudkan untuk membantu Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan yakni pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan prasarana jalan yang dibiayai oleh sumber dana APBK Tahun Anggaran 2024

Tujuan dari jasa pelayanan ini adalah :

- Menjamin bahwa pekerjaan pengawasan teknik pelaksanaan dilaksanakan sesuai rencana dengan menggunakan standar prosedur yang berlaku guna tercapainya mutu pekerjaan fisik.

- Memperkenalkan pendekatan sistem mutu untuk pencapaian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.

3. Sasaran

Tercapainya penyelesaian penanganan masalah-masalah jalan yang sifatnya khusus serta memiliki tingkat problematika yang tinggi sehingga tingkat pelayanan jalan yang diinginkan selama umur rencana dapat tercapai.

4. Lokasi Kegiatan

Kegiatan jasa konsultansi pengawasan teknis ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Lokasi jasa pelayanan ini berada di wilayah Kota Subulussalam Provinsi Aceh dengan daftar ruas jalan sebagai berikut :

1. **Pembangunan Jalan Usaha Tani Kec. Sultan Daulat**
2. **Pengerasan Jalan Tani Dusun Pelayangan Desa Buluh Dori Kec. Simpang Kiri**
3. **Pembangunan Saluran Air Sawah Desa Jabi-Jabi Dusun Lembang Lama**
4. **Normalisasi Parit dan Meninggikan Badan Jalan Lahan Perkebunan/Persawahan Masyarakat Lae Mate, Kec. Rundeng**
5. **Pembangunan Saung Kecamatan Simpang Kiri**

5. Sumber Pendanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp 19.750.000,- (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN dibiayai APBK Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024.

6. Nama dan Organisasi Pengguna Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Subulussalam Kota Subulussalam.

7. Data Dasar

Data dasar yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah data Program kegiatan Tahun Anggaran 2024.

8. Standar Teknis

Standar teknis yang digunakan adalah SOP tahun 2011, peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,